KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Infrastruktur, Modal Akselerasi Pertumbuhan
Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

Infrastruktur, Modal Akselerasi Pertumbuhan

Pembangunan infrastruktur selama tahun 2014–2024 menjadi modal akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Optimalisasi jadi salah satu catatannya.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kabinet Kerja pada 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju pada 2019-2024 melaksanakan pembangunan pada dua periode pemerintahan. Sejumlah capaian ditorehkan, termasuk pembangunan infrastruktur. Ada pula catatannya.

Presiden Jokowi menyampaikan capaian pembangunan selama 2014–2024 secara umum pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2024.

"Selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar," kata Presiden.

Sampai dengan pertengahan Agustus, menurut Presiden, pemerintah telah membangun 366.000 kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru.

Melalui pembangunan infrastruktur itu, Presiden mengklaim, pemerintah sukses menurunkan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. Dengan demikian, Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat ke-44 menjadi peringkat ke-27 pada 2024.

Indonesia, Presiden melanjutkan, merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat dari pandemi Covid-19, bahkan terus bertumbuh. "Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia timur, seperti Papua dan Maluku, justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen," kata Presiden.

>> BACA JUGA:

Pemerintah Bangun 521 Infrastruktur

Pemerintah telah membangun ratusan infrastruktur di sektor transportasi di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. KOMPAS.ID

kompas/infrastruktur

Optimalisasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Rabu (2/10/2024), mengatakan, pembangunan infrastruktur adalah modal akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kuncinya terletak pada optimalisasinya.

"Infrastruktur sering disebut kegiatan ekonomi yang tidak bisa diperdagangkan. Kita berharap, dengan tersedianya infrastruktur bisa terbentuk kegiatan ekonomi yang bisa diperdagangkan yang lebih besar, paling tidak bisa mencapai 50 persen dari PDB dari yang sekarang 38 persen," katanya.

Pekerjaan rumah berikutnya, Suharso menekankan, adalah mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun. Caranya, dengan intervensi-intervensi yang harus lebih spesifik.

Secara spesifik, ia mengangkat pembangunan bendungan selama 10 tahun terakhir. Sampai dengan akhir September 2024, pemerintah telah meresmikan 46 bendungan di sejumlah daerah.

"Dari jumlah itu, yang sudah bisa efektif bekerja karena airnya sudah ada hingga untuk memenuhi keperluan irigasi tersier ada sekitar 27-28 bendungan. Pemerintahan selanjutnya tinggal melanjutkan pembangunan irigasi teknis dari bendungan yang sudah tersedia," ujarnya.

Chief Executive Officer Supply Chain Indonesia Setijadi mengapresiasi berbagai pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi. Capaian ini membantu

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Infrastruktur, Modal Akselerasi

(Sambungan dari halaman 1)

meningkatkan efisiensi waktu tempuh logistik.

Dia mencontohkan, dengan adanya Tol Trans-Jawa, perjalanan distribusi logistik barang Jakarta-Surabaya yang biasanya memakan waktu hingga 36 jam kini hanya 12 jam. Dengan durasi perjalanan menyusut, jumlah perjalanan bisa bertambah.

Begitu pula distribusi logistik dengan kapal yang meningkat. Saat ini ada 39 trayek perjalanan kapal tol yang meningkat berlipat dibandingkan tahun 2014 yang hanya enam trayek. Tol laut memberikan konektivitas distribusi logistik yang lebih terjamin karena punya rute dan jadwal yang rutin.

"Dengan waktu tempuh yang makin singkat dan jumlah perjalanan logistik yang meningkat, ada peningkatan produktivitas yang tercipta," ujar Setijadi, Kamis (26/9).

Konektivitas

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir telah memperlancar konektivitas, layanan dasar, serta distribusi pangan di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan transportasi udara, selama 10 tahun terakhir, menurut Telisa, telah memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Membangun daerah terluar dengan dukungan konektivitas udara secara sosial memberi dampak untuk terus mengurangi ketimpangan bagi masyarakat. Ada nilai-nilai sosial yang kemudian bisa mendukung nilai ekonominya," ujarnya.

Upaya perluasan jaringan bandara baru serta rehabilitasi dan pengembangan bandara yang sudah ada, termasuk pengembangan angkutan udara perintis, ia perkirakan dapat menopang pertumbuhan ekonomi di daerah. Angkanya berkisar 5-10 persen per tahun.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, berpendapat, pembangunan infrastruktur yang masif belum optimal fungsinya sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Tol belum sepenuhnya memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakat sekitar.

Contohnya, masih banyak ditemukan kantong-kantong kemiskinan di sekitar pusat pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol. Jalan tol hanya terbatas dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas yang punya kendaraan dan mampu membayar uang tol.

Kurang efisien

Pembangunan infrastruktur juga belum menciptakan efisiensi distribusi. Ia mencontohkan, pengiriman barang menggunakan kapal dari kawasan Indonesia barat menuju Indonesia timur biasanya terisi 90 persen, tetapi saat kembali kapal cenderung kosong. Hal ini membuat biaya logistik masih mahal lantaran angkutannya tidak optimal.

"Konsep pembangunan tol laut itu untuk menghidupkan sumber ekonomi baru di kawasan Indonesia timur. Namun, rupanya hal ini belum berjalan sepenuhnya. Pada ujungnya, pembangunan infrastruktur selama ini belum bisa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia lepas dari 5 persen," ujar Ina.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto mengatakan, pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Jokowi kurang sejalan dengan pembangunan Indonesia menjadi negara industri sebagai cara untuk menjadi negara maju. Alasannya, alih-alih banyak membangun media transportasi yang murah dan masif seperti kapal laut dan kereta api, pemerintahan Jokowi justru fokus membangun jalan tol sebagai solusi logistik.

Tarif jalan tol untuk truk, yakni golongan 3, 4, 5, terlalu mahal. Jauh lebih mahal ketimbang kendaraan pribadi roda empat. "Harusnya kalau memang mau barang murah, biaya logistiknya harus bisa lebih murah," ujar Mahendra.

Sementara kapal laut dan kereta api jauh lebih efisien dalam hal logistik. Kapal laut bisa memuat barang jauh lebih banyak dan lintas pulau. Kereta api juga tidak terhambat kemacetan dan mengangkut barang lebih banyak. (BKY/DIM)